

FEMINISME DAN KETAHANAN PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA DAN ISLANDIA

Cici Afifatul Hasanah

Institut Agama Islam Negeri Jember

ciciaffatul03@gmail.com

Ayu Ferliana

Institut Agama Islam Negeri Jember

ferlinayu2101@gmail.com

Depict Pristine Adi

Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Jember

depict.socialeducation@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is describe feminism and the resilience of women in the world of work in Indonesia and Iceland. Feminism as a system of ideas, as a framework and study of social life and human experience that evolved from a women-centered perspective. In Indonesia and Iceland, this is a long history as a reflection of the responsibility regarding the reality of gender inequality. In this study researchers used a research method with the type of literature study. Data collection techniques that utilize secondary data obtained through the library and then described and analyzed to extract from the literature such as books, journals, report, documents and other materials that support this research. Based on the results and discussion that has been presented, it can be concluded that feminism is increasingly developing and being recognized by the world. Feminism and the resilience of women in these two countries have shown that women have great opportunities in the development of the world of work, politics and other fields.

Keywords: Feminism, women's resilience, the world of work

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan feminisme dan ketahanan perempuan dalam dunia kerja di Indonesia dan Islandia.

Feminisme sebagai sistem gagasan, sebagai kerangka kerja dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Di Indonesia dan Islandia, hal ini adalah sejarah panjang sebagai cerminan dari tanggung jawab tentang realitas ketidaksetaraan gender. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui perpustakaan kemudian di deskripsikan dan dianalisis untuk disarikan dari literatur seperti buku, jurnal, laporan, dokumen dan bahan lain yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa feminisme semakin lama semakin berkembang dan diakui oleh dunia. Feminisme dan ketahanan perempuan di dua negara ini sudah menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peluang besar dalam perkembangan dunia kerja, politik dan bidang lainnya.

Kata Kunci : Feminisme, ketahanan perempuan, dunia kerja

Pendahuluan

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet.¹ Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung

daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik, dan pekerjaan. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dihadapan hukum. Dari tahun ke tahun dengan memperjuangkan kaum perempuan di negara barat saat itu dengan adanya revolusi amerika tahun 1776 dan juga revolusi

¹ Kristjansson, Jakob Thor and Margret Cela.2011. "Iceland as a 'powerful' small state in the international community." Centre For Small State Studies Publication Series. University of Iceland. Working Paper 1-2011

prancis pada tahun 1792.² Pengaruh revolusi Amerika begitu besar di daratan Eropa. Revolusi kemerdekaan Amerika Serikat yang melahirkan semangat liberalisme, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, membawa pengaruh besar bagi negara-negara dunia. Dimana hal tersebut dapat menggerakkan semangat perempuan untuk memiliki hak yang setara dengan perempuan.

Dimana yang terjadi pengaruh feminisme dalam dunia kerja di Islandia di terapkan dalam sebuah kebijakan yaitu Republik Islandia merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki sistem multipartai, dimana kepala negaranya adalah presiden dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Secara historis dan

politis, Islandia terhubung ke negara-negara Skandinavia. Meskipun berada di Eropa, namun Islandia bukan merupakan bagian dari Uni Eropa. Islandia juga bagian dari negara-negara Nordik. Negara-negara Nordik selama beberapa dekade terakhir telah memiliki representasi politik perempuan tertinggi di dunia. Kenaikan ini terjadi terutama selama 30 tahun terakhir.

Pada tahun 2005, perempuan menempati lebih dari 45 persen dari anggota parlemen di Swedia, 38 persen di Finlandia, 37 persen di Denmark, 36 persen di Norwegia dan 30 persen pada pemilu di Islandia yang diselenggarakan antara 2001 dan 2005. Islandia merupakan negara yang paling membuat kemajuan

² Arivia, Gadis, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 55

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

dalam menutup kesenjangan gender.³

Sedangkan di Indonesia tenaga kerja wanita yang dimana terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tenaga kerja wanita adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Jumlah pekerja perempuan di Indonesia semakin meningkat. Peran wanita dalam membangun ekonomi bangsa semakin diperhitungkan. Data yang penulis himpun menyebutkan bahwa jumlah pekerja perempuan di sebagian besar daerah di Indonesia lebih dari setengah jumlah pekerja laki-laki.⁴ Begitu pula dengan permintaan terhadap tenaga kerja wanita yang jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan, secara

keseluruhan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki. Maka dari itu pemerintah turut andil dalam membuat peraturan dan undang-undang yang dapat melindungi pekerja perempuan sehingga para pekerja perempuan tersebut mendapatkan hak-haknya secara adil serta merasa nyaman dalam bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPAK laki-laki sebesar 83,01%, sedangkan perempuan hanya 55,44%.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih berada dibawah kalangan laki-laki. Meski begitu sudah lebih dari 50% perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja. Dengan ini menunjukkan bahwa kaum perempuan zaman sekarang, dinilai mempunyai peran yang

³ David Marsh, dan Gerry Stoker, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010) 131-132

⁴ Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997) 87-88

⁵

<https://republika.co.id/berita/po0x5h335/peran-perempuan-di-dunia-kerja-semakin-penting>. Di akses pada tanggal 04 Juni 2020, 12:32

signifikan terhadap ketahanan dalam dunia kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mendeskripsikan tentang feminisme dan ketahanan perempuan yang terjadi di beberapa negara. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “Feminisme Dan Ketahanan Perempuan Dalam Dunia Kerja Di Indonesia Dan Islandia”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang didasarkan dari latar belakang masalah adalah “Bagaimana feminisme dan ketahanan perempuan dalam dunia kerja di Indonesia dan Islandia?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuannya adalah mendeskripsikan feminisme dan ketahanan perempuan dalam dunia kerja di Indonesia dan Islandia.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, tesis, skripsi, hand out, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang di kutip di dalam penulisan proposal.⁶ Sumber studi kepustakaan yang di gunakan oleh peneliti yaitu, jurnal penelitian, buku dan berita dari internet.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perkembangan Feminisme Di Islandia

Feminisme bukanlah sebuah istilah baru di Islandia. Selama beberapa tahun terakhir Islandia telah mendapat sorotan dunia karena keberhasilannya dalam

⁶ Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) 3

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

program kesetaraan gender. Islandia juga telah mendapat peringkat sebagai pemimpin dunia dalam kesejahteraan gender selama bertahun-tahun. Islandia sering disebut sebagai negara model dalam hal pemberdayaan politik perempuan dan sebagai negara yang menghargai perempuan terutama dalam memberikan dukungan dan inspirasi baik dalam kehidupan pribadi dan profesional.⁷

Selama 5 tahun terakhir, Islandia telah menduduki peringkat teratas di Global Gender Gap Index. Hal ini diraih berdasarkan hasil yang baik dalam hal pemberdayaan politik dan pencapaian pendidikan dan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan sejak tahun 2011.

Asosiasi perempuan pertama di Islandia didirikan pada tahun 1869 di sebuah daerah kecil

di bagian utara Islandia (Kvenfélag Ripurhrepps). Deklarasi asosiasi menyatakan bahwa anggota ingin memperkuat semangat kerjasama di antara perempuan di daerah ini. Pada tahun 1894, berdiri asosiasi politik perempuan pertama di Islandia, yakni The Icelandic Women's Organization. Tugas pertama organisasi ini adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam rangka membangun sebuah universitas di Islandia. Organisasi ini kemudian memimpin yang dalam hal ini dapat disebut sebagai perbedaan partisipasi politik perempuan dari satu protopolitik. Di tahun ini berdiri juga The Icelandic Women's Right Association, dimana pada awalnya fokus utama dari asosiasi ini adalah mengenai hak pilih perempuan. Pada tahun 1915, perempuan yang berusia diatas 40 tahun diberikan hak pilih dan nasional hak untuk memperoleh jabatan.

⁷J. Ann Tickner, *Gender in International Relations, Feminist Perspectives in Achieving Global Security*, (Columbia University Press, 1992) 124-125

Pada tahun 1917, organisasi perempuan di Reykjavik membentuk asosiasi mereka sendiri (Bandalag kvenna). Terdapat total 11 organisasi perempuan pada masa itu, kebanyakan dari mereka adalah masyarakat philantropic yang berusaha untuk mengurangi masalah akibat pertumbuhan kota dan kemajuan industri tetapi tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial. Pada pemilihan dewan kota pada tahun 1922, partai-partai politik menolak untuk menempatkan perempuan dalam kursi yang aman. Hal ini membuat para perempuan sangat marah dan mereka memutuskan untuk memasukkan kandidat perempuan dalam pemilihan parlemen akhir tahun.⁸

Pada tahun 1983 berdiri organisasi yang mencakup keseluruhan partai politik perempuan di Islandia yaitu The Women's Alliance (Krennalistin). Tujuannya adalah untuk memajukan kesetaraan perempuan dan untuk meningkatkan jumlah perempuan di Parlemen Islandia. Ketika awal pembentukan The Woman's Alliance, jumlah perempuan hanya 5% dari anggota parlemen tetapi setelah pemilihan pertama dimana organisasi bergabung, jumlah ini meningkat menjadi 15%.

Sepanjang tahun 1990-an kemajuan terus terjadi di berbagai bidang. Penelitian dan kemajuan akademik mengenai isu gender meningkat, terutama setelah berdirinya Centre for Women's and Gender's Studies pada tahun 1990 dan pembentukan Gender Studies pada tahun 1996 di

⁸ J. Ann Tickner, *Gender in International Relations, Feminist Perspectives in Achieving Global Security*, (Columbia University Press, 1992) 127-128

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

Universitas Islandia. Pada tahun 1991, Kementerian Urusan Sosial membentuk sebuah komite tentang peran laki-laki dalam isu kesetaraan gender. Pada tahun 1995, sebuah pasal baru ditambahkan ke dalam Konstitusi yang mengartikulasikan bahwa perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal. Pada tahun 1996, pasangan sesama jenis diberikan hak untuk mendaftarkan hubungan mereka. Perempuan menduduki seperempat dari semua kursi parlemen pada tahun 1995, dan pada tahun 1999 mereka memperoleh 35% kursi dari semua anggota parlemen.⁹

Untuk menghadapi sikap stagnan masyarakat mengenai isu-isu kesetaraan gender, Feminist Association of Iceland didirikan pada tahun 2003 dan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan

tentang isu gender. Pada tahun yang sama kelompok laki-laki dari asosiasi tersebut menyelenggarakan kampanye terhadap keterlibatan laki-laki dalam perjuangan untuk menghentikan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Selama masa ini, banyak perempuan yang menjadi pelopor dan pemimpin di berbagai sektor, diantaranya : presiden universitas pertama, presiden asosiasi pemuda nasional, presiden asosiasi olahraga nasional dan presiden bank pertama.

Pada periode 2000 hingga 2010, terdapat beberapa pembangunan penting diantaranya : gay dan lesbian diberikan hak penuh, undang-undang yang melarang prostitusi, undang-undang pelarangan klub-klub penari striptis, dan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki rasio minimum 40:60 bagi perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2009, Johanna

⁹J. Ann Tickner, *Gender in International Relations: Feminist Perspectives in Achieving Global Security*, (Columbia University Press, 1992) 130-131

Sigurdardottir menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Islandia dan selama beberapa bulan perempuan dan laki-laki memiliki jumlah yang sama dalam menteri kabinet.¹⁰

Dari perkembangan feminisme Islandia sudah jelas bahwa perkembangan tersebut melalui proses yang sangat panjang bahwa Feminisme yang berkembang begitu pesat di Islandia kemudian juga berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagian besar berisikan mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang.

Hal ini terlihat dengan undang-undang mengenai gender yakni *The Act on Equal Status dan Equal Rights of Women and Men* (2008) atau lebih dikenal sebagai 'gender quality act' atau undang-undang kesetaraan gender. Undang-undang mengenai kesetaraan gender di Islandia pertama kali dibuat pada tahun 1975.¹¹ Undang-undang ini kemudian mengalami 4 kali revisi yaitu pada tahun 1985, 1991, 2000 dan terakhir tahun 2008. Kebijakan, praktek maupun implementasi mengenai kesetaraan gender di Islandia terlihat dari tingginya angka tenaga kerja wanita di Islandia bila dibandingkan dengan negara-negara di seluruh Eropa.

¹⁰ J. Ann Tickner, *Gender in International Relations: Feminist Perspectives in Achieving Global Security*, (Columbia University Press, 1992)132-134

¹¹ Stykarsdottir, *The Policy In Gender Equality in Iceland*, (Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, 2010) 156-157

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

Meningkatnya peran dan pengaruh perempuan di Islandia telah membuat negara ini menjadi salah satu negara yang ideal bagi perempuan. Dengan banyaknya perempuan-perempuan yang menduduki parlemen dan lembaga pemerintahan di Islandia memberikan bukti bahwa feminisme telah mengalami perkembangan yang pesat di negara ini. Sejumlah kebijakan-kebijakan yang ada di Islandia sebagian besar diperuntukkan untuk kesejahteraan perempuan. Tidak hanya menyangkut kebijakan dalam negeri, tetapi juga berpengaruh dalam kebijakan luar negerinya.

Dalam implementasinya, pemerintah Islandia memfokuskan pada 5 bidang, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan dalam kebijakan feminisme di Islandia.

Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret. Islandia boleh

dibilang menjadi salah satu yang terbaik sedunia untuk urusan emansipasi antara kaum wanita dan pria. Kesetaraan gender di negara es dengan penduduk terjarang di Eropa ini tampaknya telah tertanam dalam sejarah dan menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Islandia sudah lama menganut sistem ideologi yang kuat terhadap kesetaraan gender, bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara laki-laki dan perempuan. Islandia adalah negara yang ramah perempuan dan mengajarkan emansipasi kepada anak-anak sejak usia dini. Kini, Islandia disebut-sebut sebagai negara dengan lingkungan kerja terbaik untuk perempuan.

Tahun 2017 lalu, The Economist merilis laporan khusus untuk melihat kemajuan penyeteraan gender di seluruh dunia. Laporan itu memadukan data pendidikan tertinggi, partisipasi di dunia kerja, gaji,

biaya perawatan anak, hak persalinan ayah dan ibu, aplikasi sekolah-bisnis, serta representasi terhadap pekerjaan senior ke dalam satu bagan. Maka, berdasarkan hasil laporan tersebut, akan diketahui negara mana tempat paling baik dan paling buruk bagi kaum perempuan untuk bekerja. Indikator dari laporan tersebut adalah 1-100, dari terburuk hingga yang terbaik. Hasilnya, Islandia menempati peringkat pertama dengan indeks 85, diikuti Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Indeks 85 yang diraih Islandia menunjukkan bahwa sekitar 15 persen pekerja/karyawan perempuan di negara itu mendapatkan sekitar 85 persen dari gaji yang diperoleh kaum pria. Upaya menyetarakan hak laki-laki dan perempuan di Islandia tidak hanya sebatas pada perkara besaran gaji. Islandia

dikenal sebagai negara yang juga memberdayakan perempuan secara maksimal.

Sejak Januari 2018, di Islandia berlaku peraturan bagi perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, supaya memberikan gaji setara antara laki-laki dan perempuan. Dilansir oleh Independent, sertifikasi dilakukan untuk setiap instansi. Masalah kesenjangan gaji ini ditargetkan tuntas pada 2022 mendatang.¹²

Laporan dari NCGS Islandia merupakan negara dengan praktek terbaik untuk mendidik dan memberdayakan perempuan, termasuk pelajaran dari perguruan tinggi di negara itu tentang kesetaraan gender tingkat lanjut, politik untuk perempuan, hingga ke pelatihan kepemimpinan.

¹² <https://tirtoid./hariperempuan-sedunia-kuatnya-sejarah-emansipasi-di-islandia-diTZ>. Di akses pada tanggal 05 Juni 2020, 09:35

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

Islandia memiliki pemimpin perempuan selama 22 tahun dari 50 tahun terakhir. Parlemen Islandia setidaknya dipenuhi 38% perempuan dan 40% dalam kementerian. Selain itu, dalam jabatan senior, perempuan memegang sebanyak 42% posisi, dan 43% dalam anggota dewan perusahaan.

2. Perkembangan Feminisme Di Indonesia

a. Sejak akhir abad 19 sampai awal abad 20

Tahun 1879 – 1904. Dalam sejarah indonesia yang memelopori lahirnya feminisme di indonesia adalah R.A. Kartini. Beliau muncul akhir abad ke-19 (1879-1904).¹³ Di akhir abad ke 19 perempuan-perempuan muda terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Pada awalnya hanya sebatas membantu suami atau ayahnya, lalu perlahan-

lahan menjadi pemimpin bagi pasukan rakyatnya. Pada saat itu, konsep bahkan kesadaran mengenai kesetaraan gender belum ada. Namun, yang menarik adalah karena perempuan-perempuan ini yang kebanyakan merupakan kaum bangsawan justru mau mempertaruhkan nyawa bersama dengan prajurit dan rakyat biasa dalam melawan kompeni. Beberapa puluh tahun sebelum budi utomo hadir, kartini telah menulis surat-suratnya. Kartini memiliki semangat yang menyala-nyala dan keinginan yang kuat untuk dapat belajar dengan bebas. Namun sayangnya, beliau harus menerima kenyataan bahwa hanya boleh mengenyam pendidikan sampai usia 12,5 tahun. Pada usia itu beliau harus keluar dari sekolah dan berdiam diri dibalik tembok rumah selama 4 tahun dalam masa “pingitan”. Sedangkan saudara laki-lakinya dapat melanjutkan sekolah tinggi. Kartini hanya dapat membaca

¹³ Aripurnami et all, Sita, *Indonesian Women's Movement: Making Democracy Gender Responsive.* (Women Research Institute, 2013)112

buku-buku dan surat kabar yang ada. Dengan bahasa Belanda yang telah dikuasainya, Kartini menyalurkan gairah, energi, dan kekecewaannya melalui surat-surat yang ditulisnya. Gagasan-gagasan utama dalam tulisannya adalah meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan, baik rakyat jelata maupun golongan atas. Kartini juga menolak poligami yang dianggap merendahkan derajat perempuan serta memperjuangkan monogami (meskipun dalam praktiknya Kartini akhirnya menjadi madu bagi perempuan lain). Lebih jauh, kartini merupakan seorang feminis yang anti kolonialisme dan anti feodalisme. Ia kemudian mempelopori dibukanya sekolah untuk mendidik wanita. Setelah itu lahirlah tokoh feminisme di Jawa Barat yakni Dewi Sartika.¹⁴

Tahun 1912 sampai dengan tahun 1920. Organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika yang lahir tahun 1912. Munculnya organisasi ini menyebabkan banyak organisasi perempuan setelahnya semakin berkembang. Selanjutnya Gerakan Pembaharuan muncul di berbagai wilayah di Indonesia dengan tokoh-tokoh perempuan dibaliknya, perempuan-perempuan ini kebanyakan adalah keturunan ningrat yang sepenuhnya mendukung pergerakan feminisme di Indonesia pada waktu itu. Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 1917 telah melahirkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 dan kemudian diikuti oleh organisasi perempuan kaum katolik, dan protestan. Demikian

¹⁴ Ari Yusrini, "*tenaga kerja perempuan*",

jurnal Al-maiyyah 10, No.1 (2018), 115-131

pula di Maluku, Minahasa dan Minangkabau.¹⁵ Organisasi Istri Sedar (1930) menyuarakan anti poligami dan perceraian. Organisasi perempuan berkembang pesat pada tahun 1930-an.

b. Pendudukan Jepang (1942)
Organisasi Serikat Rakyat Istri Sedar merupakan organisasi yang sebetulnya diperalat oleh pemerintah Jepang, pembentukan organisasi ini seolah-olah Jepang memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam menentang kolonialisme Belanda. Sebenarnya ini adalah salahsatu taktik Jepang untuk mendapatkan kepercayaan dari pemuda Indonesia. Pada masa inipun telah dibentuk organisasi Fujinkai, yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini adalah

semata-mata memihak Jepang untuk kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri dari istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hirarki sejalan dengan kegiatan suami.¹⁶ Jadi, disini organisasi sadar hanya digunakan sebagai batu loncatan oleh Jepang untuk mengalahkan kolonialisme Belanda. Tetapi hal ini malah menyebabkan banyak pemuda Indonesia berbonding-bondong untuk belajar sehingga pemikiran-pemikiran pemuda Indonesia semakin luas dan mereka berani berpendapat serta bertindak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang feminisme.

c. Pasca Kemerdekaan – Orde Lama

Tahun 1950 organisasi wanita berangsur-angsur hancur, disamping itu muncullah GERWANI (Gerakan Wanita

¹⁵ Blackburn, Susan, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. (Yayasan Obor Indonesia, 2007) 98

¹⁶ Ari Yusrini, "tenaga kerja perempuan", jurnal ABlackburn, Susan, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Yayasan Obor Indonesia, 2007/1-maiyyah 10, No.1 (2018), 115-131

Indonesia) sebagai kelanjutan dari Istri Sedar. Pada dasarnya organisasi ini menyokong kampanye politik terpenting yang dilakukan oleh PKI. Anggota organisasi ini terdiri dari lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh.¹⁷

Tahun 1955 muncul Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis, serta berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan dalam bentuk Surau Perempuan, Organisasi Perempuan serta Majalah Perempuan. Selain itu, tahun 1954 lahir pula organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia).

d. Masa Orde Baru

Pada era ini organisasi masa mengalami pengekangan hingga tahun 1968. Tahun 1966 hingga

1970 terjadi pembersihan PKI. Satu-satunya organisasi yang hidup adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur kedalam Golkar. Hal ini menyebabkan muncul organisasi baru seperti PKK. Adanya bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap departemen, muncul organisasi perempuan istri pejabat yang bersifat semu. Kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami. Organisasi ini mendapat bantuan dari pemerintah baik politik maupun praktis, memperoleh berbagai kemudahan transportasi, kantor, keuangan dan sebagainya. Akhirnya timbul suatu image dimana pemerintah menggambarkan menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Pada masa ini wanita kurang berkiprah di

¹⁷ Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia, pemimpin masa depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) 55

dalam birokrasi dan pembangunan, selain itu hanya ada dua organisasi wanita yang boleh bergerak di pedesaan yaitu Aisyiah dan PKK.¹⁸

e. Era Reformasi

Runtuhnya Orde Baru yang telah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertahan selama 32 tahun telah membawa implikasi dan krisis yang bersifat multidimensi. Demokrasi yang datang ditengah hiruk pikuknya globalisasi telah memunculkan berbagai problematika yang kompleks. Isu sara yang mengancam tatanan fisik dan moral masyarakat, krisis kepercayaan terhadap penguasa, dan sebagainya.

Dalam era reformasi, munculnya berbagai organisasi wanita yang membangkitkan kembali para reformis wanita seperti Suara Ibu Peduli yang

membela hak anak, Ratna Sarumpaet yang memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi Teaternya, Nursyahbani Kacasungkana yang membela wanita dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, tidak ketinggalan Ibu Aisyah Amini yang telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, serta masih banyak lagi tokoh wanita Islam lainnya yang berkiprah dalam organisasi wanita.

¹⁹

3. Ketahanan Perempuan Di Islandia

Dalam pembentukan strategi kebijakan luar negeri yang berbasis gender, Islandia telah mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB (The United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace and security).

¹⁸ Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia, pemimpin masa depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) 60

¹⁹ Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia, pemimpin masa depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) 61-62

Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik secara damai. Hal ini juga mempertegas kesetaraan perempuan terhadap partisipasi dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan. Kebijakan pemerintah Islandia ini dituangkan dalam Iceland's Plan of Action for the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 (2000).

Rencana Aksi Nasional Islandia (Iceland's Plan of Action) terhadap implemetasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dikembangkan pada tahun 2008, ditetapkan bahwa rencana harus ditinjau tiga tahun setelah berlakunya dan diperbarui dengan mempertimbangkan kemajuan pelaksanaan. Selain rencana aksi nasional, dalam kebijakan luar

negerinya, Islandia juga membentuk Strategy for Iceland's Development Cooperation 2011-2014 yang diadopsi dari Althingi pada 10 Juni 2011. Strategi ini berdasarkan UU no.²⁰ 121/2008 dalam Iceland's Internasional Development Cooperation. Salah satu tujuan utama dari UU ini adalah untuk mengambil pendekatan holistik terhadap kebijakan pembangunan Islandia. Oleh karena itu, strategi ini mencakup kerjasama multilateral dan bilateral, bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian.

Dalam pembuatan kebijakan dan proyek yang dilaksanakan oleh organisasi internasional. Hal ini termasuk pembentukan

²⁰ Dean E mundy. "Framing Saint Johanna: Media Coverage of Iceland's First Female (and the World's First Openly Gay): Prime Minister, Journal of Interdisciplinary Feminist Thought" Vol. 7: Iss. 1, Article 5.(2013)232- 245

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

kelompok kerja dalam kesetaraan gender oleh kementerian luar negeri dan ICEIDA,²¹ persiapan kerjasama pengembangan kebijakan mengenai gender bersama dan meninjau Rencana Aksi mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Kelompok kerja telah ditetapkan, Rencana Aksi telah ditinjau dan Rencana Aksi kedua sedang dipersiapkan. Dalam implementasinya, pemerintah Islandia memfokuskan pada 5 bidang, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci penekanan utama pemerintah dan tindakan untuk meningkatkan hak-hak perempuan merupakan aspek penting dalam rencana kerja internasional Islandia pada

kerangka hak asasi manusia.²²

Dalam beberapa tahun terakhir peningkatan terhadap penekanan ini telah ditempatkan dalam kebijakan luar negeri Islandia mengenai hak asasi manusia.

Salah satu kampanye terbesar Islandia adalah memberikan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam negosiasi iklim internasional. Islandia telah membuat keputusan politik untuk memprioritaskan isu-isu gender dalam negosiasi iklim internasional. Ada beberapa alasan terkait dengan keputusan Islandia tersebut. Pertama, prinsip persamaan hak dan inklusi, dan pemberdayaan perempuan dalam semua aspek pengambilan keputusan. Kedua, fakta bahwa perubahan iklim mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda karena faktor sosial, ekonomi dan lainnya.

²¹ Antonius sitepu. *Studi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)167

²² Jony Lovendusky. *State Feminism and Political Representation*. (NY:Cambridge University Press, 2005) 234

Ketiga, pragmatisme sederhana untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam memecahkan masalah ini mungkin merupakan hal yang paling mendesak yang dihadapi umat manusia.²³

Dari beberapa alasan inilah yang menyebabkan Islandia menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam semua aspek utama dari negosiasi iklim. Hal itu diakui dalam perjanjian Cancun bahwa partisipasi perempuan sangat penting dalam pengambilan tindakan yang efektif terhadap perubahan iklim. Konsekuensi dari perubahan iklim tidak sama bagi perempuan dan laki-laki. Pengalaman, pengetahuan dan keahlian khusus perempuan dengan rekan laki- laki

mereka. Meskipun jejak ekologi perempuan umumnya lebih kecil dari laki-laki, konsekuensi yang sulit akibat perubahan iklim berdampak pada kegiatan ekonomi perempuan, tidak kurang dari laki-laki, selain itu pekerjaan rumah tangga mereka dan perjuangan sehari-hari untuk mencari nafkah menjadi semakin sulit. Efek perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan bangsa.

Kiprah perempuan dalam bidang politik di Islandia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, paling tidak ada satu atau dua orang perempuan yang duduk di parlemen Islandia meskipun hal ini tidak terjadi pada setiap periode. Pada tahun 1980, Islandia untuk pertama kalinya memiliki seorang presiden perempuan, Vigdis

²³ Foreign Affairs ."Gender Equality in Iceland's International Development Co-operation". Icelandic International Development Agency, Ministry for (2013)250-260

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

Finnbogadottir, yang dipilih melalui pemungutan suara.

Pada tahun 2009, Islandia kembali dipimpin oleh seorang perempuan yakni Johanna Sigurdardottir yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Perempuan-perempuan di Islandia juga banyak mendominasi sejumlah kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Salah satunya adalah kementerian luar negeri. Perempuan mulai mengambil tempat dalam kementerian luar negeri pada tahun 1983. Pada periode tahun 1998-1999, Kementerian Luar Negeri Islandia telah merekrut perempuan untuk 50 persen posisi baru yang membutuhkan gelar sarjana.

4. Ketahanan Perempuan Di Indonesia

Pada tahun 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat pula aturan mengenai pekerja

perempuan. Namun pada kenyataannya, penerapan UU Ketenagakerjaan tersebut belumlah maksimal. Implementasi undang-undang (UU) yang terhambat peraturan pelaksanaannya adalah salah satu dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antar instansi/ lembaga pemerintah.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang di dalam pasal 1 angka 2 UU No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tujuan UU No.13 tahun 2003 tersebut adalah untuk memberayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi dan juga mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah.

Jadi pengertian tenaga kerja wanita merupakan salah satu Jumlah pekerja perempuan di Indonesia semakin meningkat. Peran wanita dalam membangun ekonomi bangsa semakin diperhitungkan. Data yang penulis himpun menyebutkan bahwa jumlah pekerja perempuan di sebagian besar daerah di Indonesia lebih dari setengah jumlah pekerja laki-laki. Begitu pula dengan permintaan terhadap tenaga kerja perempuan yang

jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan, secara keseluruhan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki.

Maka dari itu pemerintah turut andil dalam membuat peraturan dan undang-undang yang dapat melindungi pekerja perempuan sehingga para pekerja perempuan tersebut mendapatkan hak-haknya secara adil serta merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga kerja wanita terbesar di NTB berasal dari Kabupaten Sumbawa sebesar 4,235 orang dari total keseluruhan sebesar 9,968 orang. Maka dari itu ketahanan perempuan di Indonesia terutama di NTB sangat besar dari berbagai kabupaten.²⁴

²⁴ KOWANI, *Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*,(Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2009) 45

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwasannya tidak hanya di negara indonesia saja yang memperjuangkan tentang kesetaraan gender kaum perempuan mengenai perannya dimasyarakat, tetapi negara lain juga memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Salah satu negara yang memperjuangkan kesetaraan gender selain Indonesia yaitu Islandia. Negara-negara lain terutama Indonesia dan Islandia mengalami pasang surut dan tantangannya masing-masing yang pastinya berbeda dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan.

Ketidaksetaraan gender yang dialami oleh kedua negara ini ada di berbagai bidang, seperti dibidang politik, ekonomi, maupun dunia kerja. Dalam dunia kerja awalnya mereka membedakan jumlah atau porsi untuk ditempati oleh tenaga kerja yang berasal dari kaum

perempuan. Membedakan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, dimana pekerja perempuan lebih sedikit upah yang diperoleh daripada laki-laki. Pembatasan jabatan bagi kaum perempuan dalam hal politik, serta ketidakbolehan kaum perempuan dalam hal memperoleh pendidikan.

Tetapi dengan adanya kesadaran dari kaum perempuan akan adanya kesetaraan gender bagi perempuan, maka kedua negara mampu memperjuangkan hak perempuan dalam hal kesetaraan gender. Perjuangan negara-negara ini dalam menegakkan kesetaraan gender membuahkan hasil, dimana di Indonesia kaum perempuan diperbolehkan menerima pendidikan dan dengan adanya HAM yang telah diatur dalam Undang-Undang pasal 28 A-J. Dengan ini kaum perempuan di Indonesia memiliki peluang dan

porsi yang sama dengan laki-laki dalam dunia kerja.

Potret perkembangan pada tanggal 8 maret 2018 kemaren dunia merayakan Hari Perempuan Internasional. Sejak tahun 1977, peringatan tersebut diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperjuangkan hak perempuan dan perdamaian dunia. Dalam menyambut hari istimewa bagi perempuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga secara khusus mengucapkan "Hari Perempuan Internasional". Kepala Negara turut berpesan bahwa saatnya perempuan makin aktif berkarya dan bisa mendapatkan hak-haknya untuk kehidupan yang semakin berkeadilan.

Salah satu komponen pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dalam

pendapatan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada Agustus 2017 rata-rata upah bersih pekerja perempuan tercatat sebesar Rp 2,3 juta/bulan. Jumlah tersebut meningkat 5,02% dari Agustus 2016 sebesar Rp 2,19 juta/bulan. Namun, gap pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan nampak makin melebar di Agustus 2017, yakni mencapai Rp 690.000/bulan. Gap pendapatan memang sempat menipis pada Agustus 2015 (Rp 370.000/bulan), namun kemudian menanjak secara konsisten dua tahun setelahnya. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh porsi tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor produktif masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.²⁵ ketiga sektor,

25

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180309180650-33-6793/para-perempuan-ini-posisi-wanita-dalam->

Cici Afifatul Hasanah, Ayu Ferliana, Depict Pristine Adi

itu jumlah tenaga kerja perempuan masih relatif rendah, dibandingkan tenaga kerja laki-laki.

Melansir hasil kajian pada buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017 (dipublikasikan oleh BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), pembangunan perempuan masih konsisten lebih rendah daripada laki-laki. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibagi per jenis kelamin, IPM laki-laki sudah termasuk kategori "tinggi" dengan nilai di atas 70, sedangkan perempuan masih pada level "sedang". IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,

dan standar hidup layak. Oleh karena itu, beberapa indikator yang digunakan antara lain Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Mengutip data BPS, IPM Perempuan terus mencatatkan pertumbuhan positif selama 7 tahun terakhir. Hanya saja pada tahun 2016, pertumbuhan IPM Perempuan tercatat masih lebih rendah daripada IPM laki-laki, dimana IPM Perempuan tumbuh 0,69% dan IPM laki-laki tumbuh 0,92%. Padahal, pada tahun 2015, IPM Perempuan dapat tumbuh hingga 1,07% , sementara IPM laki-laki hanya tumbuh 0,31%.

BPS menyatakan bahwa pertumbuhan IPM perempuan yang lambat pada tahun 2016, merupakan akibat dari komponen IPM Perempuan yang pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya.

ekonomi-indonesia. Di akses pada tanggal 05 Juni 2020, 08.43

Dari era perkembangan ketahanan perempuan dalam dunia kerja masih relative rendah di tahun sebelum- sebelumnya dari tahun 2015-2018 meskipun di pandang relative rendah akan tetapi tetap di masa tersebut masih ada proses perkembangan mulai dari teknologi yang berkembang di bidang industry yang dimana dunia menuju di e Era industri 4.0 sudah di depan mata, kondisi ini diprediksi membuka peluang terbukanya profesi baru dan partisipasi perempuan bekerja, serta membaiknya kesetaraan gender.

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan metode kajian kepustakaan maka dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan di negara-negara di

dunia saling memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan, supaya perempuan tidak diperlakukan semena-mena dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam masyarakat khususnya dunia kerja.

Di Indonesia salah satu perempuan yang mendedikasikan dirinya sebagai penegak kesetaraan gender perempuan yaitu R. A Kartini, dan Dewi Sartika. Meski banyak tantangan yang mereka hadapi tetapi mereka tetap teguh dengan pemikirannya. Oleh karena itu, lambat laun banyak organisasi kaum perempuan yang berdiri. Di Islandia sendiri hasil yang diperoleh yaitu semakin bertambahnya porsi perempuan dalam dunia kerja.

Hal ini membuktikan bahwa feminisme semakin lama semakin berkembang dan diakui oleh dunia. Feminisme dan ketahanan

perempuan di dua negara ini sudah menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peluang besar dalam perkembangan dunia kerja, politik dan bidang lainnya.

Ari Yusrini, *tenaga kerja perempuan*,
jurnal Al-maiyyah, 10
No.1(2018) 115-131

Mely, G. Tan. 1991. *Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Daftar Pustaka

Kristjansson, Jakob Thor and Margret Cela. 2011. "Iceland as a 'powerful' small state in the international community." Centre For Small State Studies Publication Series. University of Iceland. Working Paper 1-2011

Marsh, David & Stoker, Gerry. 2010. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Bandung: Nusa Media)

Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan,) zed. Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)

Tickner, J. Ann. 1992. *Gender in International Relations: Feminist Perspectives in Achieving Global Security*. (Columbia University Press,)

Arivia, 2006. *Gadis, Feminisme Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Stykarsdottir, 2010. *The Policy In Gender Equality in Iceland*, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament

Aripurnami et all, Sita,2013. *Indonesian Women's Movement: Making Democracy Gender Responsive*. Women Research Institute

Susan,Blackburn, 2007. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*.(Yayasan Obor Indonesia

Dean E mundy. "Framing Saint Johanna: Media Coverage of Iceland's First Female (and the World's First Openly Gay): Prime Minister, Journal of Interdisciplinary Feminist Thought" Vol. 7: Iss. 1, Article 5.(2013)232-245

- Sitepu Antonius, 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- https://republika.co.id/berita/po0x5h335/peran-perempuan-di-dunia-kerja-semakin-penting di akses pada tanggal 04 Juni 2020, 12.32
- Lovendusky. *State Feminism and Political Representation*. (NY:Cambridge University Press, 2005)
- https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180309180650-33-6793/para-perempuan-ini-posisi-wanita-dalam-ekonomi-indonesia di akses pada tanggal 05 Juni 2020, 08.43
- Foreign Affairs ."Gender Equality in Iceland's International Development Cooperation". Icelandic International Development Agency, Ministry for (2013)
- https://tirtoid./hariperempuan-sedunia-kuatnya-sejarah-emansipasi-di-islandia-diTZ di akses pada tanggal 05 Juni 2020, 09.35
- Kowani. 2009. *Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan
- McCann et all. *Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives*. Routledge, 2003.
- Ridjal et all, Fauzie, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993.
- Roces, Mina and Louise Edwards, *Women's Movements in Asia: Feminism and Transnational Activism*. London and New York: Routledge, 2010.